



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Disampaikan Oleh : Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

Nomor Anggota : A-429

***Bismillahirrahmanirrahim***

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yang Kami Hormati,  
Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI,  
Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,  
serta Hadirin yang kami berbahagia.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI dan mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2021 masih belum memuaskan, sehingga berdampak kurang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, terlebih dalam masa pandemi yang berat,

seharusnya APBN menjadi motor utama kebijakan ekonomi yang optimal untuk menjaga terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Selanjutnya, dalam menyikapi Hasil Pembicaraan terkait Rancangan Undang-undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai bahwa tidak tercapainya target pertumbuhan tahun 2021 semakin menjauhkan harapan untuk bisa keluar dari *middle income trap* lebih cepat. Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 6 persen per tahun agar bisa keluar dari *middle income trap*. Realisasi pertumbuhan 3,69 persen jauh dari target yang telah ditentukan. Pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi sebelum bonus demografi berakhir pada tahun 2036. Faktor pandemi covid-19 memang memengaruhi bagaimana pertumbuhan bisa kembali ke *trajectory* awal tetapi pertumbuhan rendah telah terjadi sejak 2015. Hal ini berarti bahwa banyak kelemahan fundamental yang menyebabkan Indonesia belum mampu tumbuh lebih baik sehingga membutuhkan reformasi struktural yang lebih progresif.
2. Fraksi PKS berpendapat bahwa risiko kesinambungan fiskal cukup tinggi yang terlihat dari masih tingginya defisit keseimbangan primer tahun 2021 yang mencapai Rp431,57 triliun atau 2,54 persen dari PDB. Kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah dinilai belum efektif, tidak hanya selisih negatif pendapatan dengan belanja yang masih sangat tinggi, bahkan anggaran tidak mampu untuk membayar beban bunga utang. Sehingga seluruh kewajiban beban bunga utang harus ditutupi dengan pembentukan utang baru.
3. Dalamnya defisit keseimbangan primer tersebut menggambarkan fleksibilitas fiskal yang semakin ketat. Selain itu, tingkat produktivitas belanja negara yang dibiayai oleh penerbitan utang baru dinilai sangat rendah. Hal ini dikarenakan "kue" anggaran yang dialokasikan untuk belanja pembayaran bunga utang semakin meningkat tiap tahunnya. Pada 2021 sebesar Rp343,5 triliun atau meningkat 9,36 persen dari tahun sebelumnya. Bahkan angka ini jauh lebih besar dari belanja subsidi yang hanya mencapai Rp242,09 triliun pada tahun tersebut.
4. Fraksi PKS berpendapat bahwa kenaikan rasio utang pada 2021 menjadi sebesar 40,74 persen dari PDB menjadi sinyal kurang baik. *Debt Service Ratio* (DSR) Indonesia berada pada 41,4% artinya bahwa Utang saat ini telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio sebesar 25%-35%. Sebagai catatan, utang yang dipupuk pemerintah sebagian besar berasal dari SBN yang yieldnya sangat tinggi sebesar 6,74 persen (imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun). Sebagai perbandingan, yield Thailand sebesar 2,23 persen. Artinya sumber pendanaan APBN Indonesia tidaklah murah, pada 2022 tercatat beban pembayaran bunga utang Indonesia kembali meningkat menjadi Rp 405,9 triliun.
5. Berdasarkan data statistik, sejak tahun 2014 rasio utang Pemerintah terhadap PDB secara kontinyu mengalami kenaikan serta puncaknya terjadi lonjakan tajam pada tahun 2020 dan 2021. Pada 2014, rasio utang berada di angka 24,74 persen dari PDB. Kemudian dari 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut, 27,43 persen, 28,33 persen, 29,4 persen, 29,98 persen dan 29,8 persen terhadap PDB. Pada 2020 rasio utang mencapai 39,39 persen dari PDB atau Rp6.079,17 triliun dan 2021 rasio utang sebesar 40,74 persen atau Rp6.950 triliun. Perhitungan utang tersebut belum memperhitungkan utang BUMN yang juga merupakan entitas yang dimiliki pemerintah dan terdapat andil kewajiban pemerintah di dalamnya. Terlebih saat ini banyak BUMN yang sedang bermasalah besar dengan pengelolaan utangnya.

6. Fraksi PKS berpendapat penggunaan anggaran untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp113,46 triliun yang sebagian besar ditujukan untuk BUMN dan program PEN tidak sesuai dengan tujuan. Pemerintah cenderung mengalokasikan dana PMN kepada BUMN yang mengalami masalah kesehatan keuangan akibat dari adanya fraud, moral hazard dan kelalaian manajemen internal. Akibatnya terdapat potensi kerugian yang harus ditanggung negara sebagai pemegang saham dan masyarakat secara umum sebagai nasabah. Kemudian inisiatif Pemerintah dengan menyuntikan dana kembali dalam bentuk PMN, dinilai tidak pada tempatnya. Hal ini karena kerugian diakibatkan oleh sekelompok orang, namun kemudian harus ditanggung oleh APBN. Kemudian PMN untuk program PEN juga terdapat catatan dari hasil pemeriksaan BPK, dimana dari penentuan kriteria, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dinilai tidak memadai. Artinya bahwa pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang menggunakan dana APBN oleh pemerintah dianggap belum sepenuhnya kredibel dan akuntabel.
7. Terdapat pula tambahan PMN kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp4,3 triliun untuk pemenuhan modal awal PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Pada awal proyek ini pemerintah meyakinkan bahwa proyek ini berskema B to B, namun perhitungan meleset, yang pada akhirnya negara harus menanggung kewajiban dengan mengambil dana APBN.
8. Fraksi PKS menilai proses perencanaan dan realisasi program belum optimal dan cenderung buruk yang tercermin dari tingginya SILPA dan SAL. Pada 2021 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp96,66 triliun dan akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi Rp337,78 triliun. Hal ini menjadi ironi dengan biaya perolehan utang yang tidak murah, seharusnya pemerintah memanfaatkan setiap rupiah dengan produktif dan efisien.
9. Fraksi PKS berpendapat bahwa target penurunan kemiskinan yang ditugaskan kepada pemerintah tidak tercapai pada tahun 2021. Rakyat miskin mencapai 26,50 juta jiwa atau sebesar 9,71 persen per September 2021. Sementara target APBN 2021 pada kisaran 9,2 – 9,7 persen. Tingkat kemiskinan masih dibawah kondisi sebelum pandemi, yakni 24,79 juta jiwa atau 9,22 persen. Padahal target RPJMN 2020-2024 target kemiskinan ditargetkan menjadi 7 persen hingga 6,5 persen. Demikian pula target rasio gini tidak tercapai. Pada target APBN 2021 dicanangkan rasio gini pada kisaran 0,377 sampai 0,379, sementara realisasinya hanya sebesar 0,381. Fraksi PKS mendesak pemerintahan untuk lebih progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan dan kemiskinan.
10. Fraksi PKS menilai turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional menjadi sebesar 6,49 persen pada Agustus 2021 jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,07 persen belum cukup memadai, karena masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 5 persen. Pemerintah juga perlu berupaya memperbaiki kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah terkait ancaman serius masalah tingkat "pengangguran usia muda" di Indonesia yang tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Pengangguran usia muda di Indonesia sebanyak 16 persen. Sementara negara lain seperti Thailand (7 persen), Vietnam (7,2 persen) Filipina (7,3 persen), bahkan negara yang baru merdeka seperti Timor Leste (13,8 persen) lebih baik dari Indonesia.
11. Sasaran pembangunan yang juga tidak tercapai ialah target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang dicapai hanya sebesar 72,29 dari target 72,78 sampai 72,95. Perlu diingat bahwa Pemerintah perlu mengejar target IPM pada RPJMN 2020-2024

sebesar 75,54. Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki pencapaian yang belum sesuai target tersebut. Sejumlah indikator daya saing juga menunjukkan bahwa kondisi pendidikan dasar dan kesehatan di Indonesia belum mengalami banyak perbaikan selama empat tahun terakhir. Dalam Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2021 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia menurun, tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 67 kemudian menjadi peringkat 70 pada tahun 2021 dari 134 negara.

12. Fraksi PKS mencatat bahwa NTP Petani Padi selalu lebih rendah dibandingkan Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang masing-masing berada pada kisaran 102 hingga 104. Petani Padi masih menjadi kelompok yang paling rendah kesejahteraannya dibanding petani lainnya. NTP subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 sebesar 98,21, turun dari tahun sebelumnya. NTP subsektor tanaman pangan dibawah 100, berarti Petani Padi mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Petani Padi mengalami penurunan. :
13. Fraksi PKS berpendapat bahwa penurunan rasio perpajakan yang terus terjadi hingga 2021 pada angka 9,12 persen sangat mengkhawatirkan. Padahal rasio perpajakan pernah mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2001 hingga 2008, dari sebelumnya 11,3 persen menjadi 13,3 persen terhadap PDB. Berbagai celah pendapatan yang semestinya dapat dioptimalkan belum dijalankan secara optimal dan membutuhkan langkah-langkah yang lebih terstruktur dan sistematis.
14. Fraksi PKS mencatat bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan. Secara historis, tren penerimaan perpajakan sangat berfluktuasi dan tidak stabil. Selama masa ledakan komoditas, penerimaan perpajakan mampu mencatatkan pertumbuhan yang signifikan hingga 2 digit, namun setelah itu pertumbuhan perpajakan tumbuh tidak menentu. Fraksi PKS mencermati bahwa fluktuasi tersebut menandakan reformasi fiskal dan administrasi perpajakan belum berjalan.
15. Fraksi PKS menilai bahwa pemerintah seharusnya masih memiliki ruang yang cukup luas untuk mengoptimalkan penerimaan dari ledakan komoditas. Pajak ekspor untuk komoditas sumber daya alam perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu secara terukur menyiapkan jalan keluar atas potensi berkurangnya pendapatan setelah berakhirnya era *booming* komoditas. Sektor dan peluang penerimaan mana yang perlu ditingkatkan untuk menambal penurunan pendapatan setelah ledakan tersebut berakhir, belum sepenuhnya terukur dan terproyeksikan. Padahal, kemungkinan tersebut sudah semakin dekat.
16. Fraksi PKS juga mencermati rendahnya peranan belanja negara terhadap PDB. Masih lemahnya peranan belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kualitas belanja (*spending better*) belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu indikator yang menunjukkan situasi tersebut adalah kecenderungan belanja negara terealisasi di akhir tahun. Fraksi PKS senantiasa mendorong Pemerintah agar meningkatkan kualitas belanja negara agar dampak dan manfaat belanja negara dalam APBN dapat dirasakan masyarakat lebih optimal.
17. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar anggaran *mandatory spending* namun tidak terbatas terutama seperti Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan (termasuk PBI) agar sangat diperhatikan kualitasnya, termasuk juga belanja subsidi, belanja sosial dan pengentasan kemiskinan, dan belanja-belanja pro rakyat lainnya karena sangat terkait dan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.

18. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah agar melakukan Koordinasi dan Pemantauan secara berkala dan lebih sungguh-sungguh atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP tahun 2021 bahkan tahun sebelumnya yang masih belum selesai penyelesaian tindak lanjutnya. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan penyajian laporan 4 (empat) Kementerian/ Lembaga yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sebelumnya mendapatkan Opini WTP menjadi WDP atas Laporan Keuangan tahun 2021. Termasuk juga dengan 27 (dua puluh tujuh) permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan dan juga permasalahan sebelumnya sebanyak 26 (dua puluh enam). Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar terus memperbaiki kinerja transparansi fiskal ke depan.
19. Fraksi PKS berpendapat bahwa Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Non-Program PC-PEN pada 80 K/L masih ada yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebagaimana temuan BPK RI, memerlukan tindak lanjut serius oleh pemerintah. Fraksi PKS juga mencermati LHP pada LKPP 2021, Pemerintah mendapatkan catatan temuan oleh BPK yang merupakan kelanjutan temuan atas LKPP 2020 terkait program PC-PEN. Temuan berulang memberikan indikasi masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi kinerja dalam penggunaan anggaran. Selain itu pemerintah perlu memiliki pengaturan lebih lanjut atas Kriteria dan Mekanisme perhitungan alokasi anggaran Mandatory spending dalam APBN sebagaimana rekomendasi BPK. Juga tindak lanjut atas pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp10,20 triliun pada 10 Kementerian/Lembaga yang tidak memadai, sebagaimana temuan BPK.
20. Fraksi PKS terus mengingatkan dan mendesak langkah antisipatif atas menurunnya serapan belanja TKDD. Harus ada mitigasi risiko mengingat TKDD merupakan salah satu instrumen strategis yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah dengan jumlah hampir mencapai sepertiga dari APBN. TKDD 2021 terserap Rp785,70 triliun, atau 98,77 persen dari target APBN atau menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 99,82 persen. Fraksi PKS sangat menyesalkan adanya sisa Rp100 triliun pagu TKDD yang tidak terserap di tahun 2021, yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memberi dukungan pada upaya pemulihan ekonomi rakyat di daerah.
21. Fraksi PKS terus mengingatkan pentingnya komitmen dan evaluasi menyeluruh terhadap 20 persen mandatory spending anggaran pendidikan terutama melalui TKDD. Tersebarannya anggaran pendidikan membutuhkan komitmen dan pengawasan yang komprehensif sehingga 20 persen mandatory spending tersebut tepat peruntukannya sesuai prioritas sektor pendidikan yang seharusnya. Fraksi PKS juga mendesak solusi konkret atas berbagai permasalahan yang muncul dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun realisasi DAK Fisik tahun 2021 naik 13,74 persen dari realisasi tahun 2020, tetapi realisasi ini masih menjadi yang terendah di antara semua komponen Transfer ke Daerah.
22. Fraksi PKS sangat menyesalkan kejadian berulang besarnya dana yang mengendap di perbankan yang mencapai Rp113,38 triliun hingga 31 Desember 2021, meskipun nilai ini sudah turun signifikan dari bulan sebelumnya sebesar Rp203,05 triliun atau 44,41 persen dari November 2021. Ditengah beban berat dampak pandemi seharusnya serapan anggaran daerah yang optimal diperlukan untuk proses percepatan pemulihan ekonomi rakyat di daerah.
23. Fraksi PKS juga mendesak langkah nyata untuk memperbaiki hasil revidi Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang diterbitkan BPK pada tahun 2021 yang menunjukkan

bahwa sebanyak 443 dari 503 Pemda (88,07 persen) yang direviu masih masuk dalam kategori "Belum Mandiri".

:

Demikian Pendapat Fraksi PKS DPR-RI, dengan mengucapkan *Bismillahir-rahmannirrahim*, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheid nota* (menerima dengan catatan)** hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu dalam mendengarkan pendapat Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, billahi taufiq wal hidayah,  
Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 4 Shafar 1444 H

:

1 September 2022 M

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.**  
No. Anggota: A-449

  
**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.**  
No. Anggota: A-427